

PENDIDIKAN ISLAM DAN MODERNITAS DI TIMUR TENGAH: STUDI KASUS MESIR

Muhammad Ihsan
Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu

Abstract

This article deals with Islamic education and modernity in the Middle East. Modern education began to be known in Egypt since the advent of Napoleon Bonaparte in the early 19th century in this country. However, it was in the epoch of Muhammad Ali that the transition from traditional education to modern education began. Further, in the time of Ismail Pasha due to education reorganization, traditional education began to compete with secular-modern education.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, modernitas, sekolah modern, Timur Tengah

PENDAHULUAN

Membicarakan pendidikan Islam di Timur Tengah, wilayah di mana Islam pertama kali diperkenalkan akan lebih *appreciasif* bila kita membicarakan terlebih dahulu aspek-aspek historisitas yang mendorong lahirnya pendidikan Islam itu sendiri.

Secara historis, Nabi Muhammad layak disebut sebagai *the founder of Islamic education* karena beliau adalah yang menerima wahyu yang sarat dengan doktrin-doktrin mengenai urgensi pendidikan bagi manusia.

Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan munculnya Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Timur Tengah, di mana Islam lahir dan pertama kali berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan—untuk tidak menyebut sistem—merupakan transformasi besar, sebab masyarakat Arab pra-Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal (Azra, 1999: vii).

Pada awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan Islam formal belum terselenggara. Pendidikan Islam yang berlangsung dapat dikatakan umumnya bersifat informal; dan inipun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah—penyebaran dan penanaman dasar-dasar akidah dan ibadah Islam. Dalam kaitan itulah, dapat dipahami mengapa proses pendidikan Islam berlangsung di rumah sahabat; yang paling terkenal adalah *Dar al-Arqam*. Tetapi ketika masyarakat Islam telah terbentuk, maka pendidikan Islam diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam *halaqah*, lingkaran belajar, yang pada periode berikutnya berkembang jadi madrasah (Azra, 1999: vii).

Wilayah Timur Tengah yang sejak awal merupakan basis lahirnya peradaban Islam, khususnya dalam bidang pendidikan Islam menarik untuk dikaji terutama ketika arus modernisasi sebagai produk peradaban Barat mulai melanda hampir seluruh wilayah di dunia ini, termasuk wilayah Timur Tengah.

Agak sulit dipungiri bahwa arus modernisasi dengan dasar filosofisnya sendiri-sendiri telah membawa perubahan tersendiri sehingga perubahan menjadi semacam bahagian yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Modernisasi yang mulai digulirkan di Eropa Barat pada kurun waktu lebih dari 500 tahun yang lalu segera menjadi isu global sehingga seluruh wilayah pada akhirnya mendapat dampak dari kebudayaan Barat yang dinamis, bahkan masyarakat yang dikategorikan statis sekalipun mendapat imbas dari arus modernisasi tersebut (Szyliowiez, 1973: 1).

Modernitas yang melanda Timur Tengah selama 150 tahun terakhir, telah mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat tradisional. Konflik dan reaksi berlangsung di mana-mana sebagai konsekuensi dari interaksi antara modernitas dan tradisi lama masyarakat (Szyhowiez, 1973: 1). Grunebaum (1965: 141-142) mengemukakan bahwa individu dan masyarakat terpecah-pecah, sebagian menerima dan sebagian lagi menolak agresi mentalitas Barat ke wilayah tersebut. Karena dampak dari agresi tersebut kelompok-kelompok tertentu dan pemerintah segera meningkatkan *power* dengan cara mengadopsi teknologi Barat dan mensponsori perlunya modernisasi. Akibatnya, perubahan yang dinamis telah menjadi bahagian yang esensial dari kehidupan masyarakat Timur Tengah yang meliputi Mesir, Saudi

Arabiah, Jordania, Palestina, Libanon, Syiria, Turki, Irak, Iran, Emirat dan kesultanan-kesultanan yang ada di kawasan teluk persia (Mufrodi, 1997: 135).

Pendidikan modern masuk ke wilayah Timur Tengah melalui “pintu belakang” berupa pengaruh-pengaruh budaya atau dominasi politik. Ia menysihkan tradisi Islam dan menggantinya dengan tradisi Barat pada semua level, mulai dari tingkat dasar sampai universitas (Bilgrami dan Asyraf, 1989: 49). Pemerintah setiap negara Islam berasumsi dengan mengambil alih sistem Barat itulah, negara mereka dapat mencapai kemajuan dunia modern. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional, madrasah-madrasah dan *dar al-ulum*, dengan serta merta lebih menjadi semacam badan usaha yang ditempatkan di masjid-masjid dan rumah-rumah pribadi, atau diberi bantuan ala kadarnya oleh pemerintah agar lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut dapat tetap berdiri (Bilgrami dan Asyraf, 1989: 49). Di lain pihak, sejumlah lembaga pendidikan dan sekolah yang barudibangun dengan penampilan dan mutunya sendiri-sendiri. Sistem pendidikan yang baru ini membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi para mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan universitas-universitas.

Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan pendidikan Islam dan modernitas di Timur Tengah. Namun demikian, karena terbatasnya ruang dalam tulisan ini untuk membahas satu-persatu wilayah Timur Tengah, maka penulis mengambil Mesir sebagai wilayah kajian, karena kawasan ini memiliki tujuan dan struktur pendidikan serta problema-problema serupa dengan yang di hadapi negara-negara Arab lainnya (Szyliowiez, 1973: 260).

Menurut Hamid Hasan Bilgrami dan Sayyid Ali Asyraf (1989: 49) dalam tulisannya *The Concept of Islamic University* bahwa pendidikan modern masuk ke Mesir bersama-sama dengan datangnya Napoleon Bonaparte pada awal abad ke-19, di mana dalam buku *Pendidikan Islam di Indonesia dan Mesir Titik Berat pada SMP-SMA*, diuraikan bahwa masa pemerintahan Muhammad Ali telah menjadi awal masa transisi dari pendidikan tradisional kepada pendidikan modern. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Ismail Pasya mulai diusahakan reorganisasi pendidikan, dan dari sini, pendidikan tradisional mulai bersaing dengan pendidikan modern yang sekuler

(Hasan, 1983: 31). Serangan terhadap pendidikan tradisional sering tampak dari usaha yang menginginkan Al-Azhar sebagai pusat pendidikan Islam yang penting. Bersamaan dengan ini, telah dikeluarkan berbagai undang-undang untuk mengatur kembali pendidikan yang diselenggarakan pada universitas tersebut. Usaha yang sangat berarti antara lain, pemerintah, sejak kemerdekaan tahun 1922, pada tahun 1930-an dan 1940-an, beberapa undang-undang telah dikeluarkan untuk pengaturan sekolah-sekolah asing dan swasta. Undang-undang ini antara lain berkenaan dengan keharusan pengajaran bahasa Arab, sejarah Islam dan agama di sekolah-sekolah (Hasan, 1983: 31).

Revolusi Juli 1952 juga merupakan periode penting bagi pendidikan Islam di Mesir, usaha perbaikan, terutama pendidikan Islam, yang banyak dibicarakan pada masa sekarang ini tidak terlepas dari perbaikan yang dilakukan pada masa awal revolusi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada makalah ini akan dibahas gambaran umum pendidikan Islam dan modernisasi pendidikan Islam di Mesir.

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN ISLAM DI MESIR

Kuttab, masjid dan madrasah merupakan lembaga pendidikan utama di Mesir dan kawasan Timur Tengah pada umumnya. Pada periode berikutnya, institusi tersebut berkembang menjadi sekolah-sekolah modern seperti yang dapat kita saksikan dewasa ini.

Kuttab, pada dasarnya berarti anak yang belajar *kitab*, tetapi dipahami secara populer dengan arti *maktab* sebagai tempat belajar *kitab* dan Al-Qur'an. Kata *kuttab* dan *maktab* sama-sama dipergunakan untuk menentukan tempat pendidikan pertama (Hasan, 1983: 31). Goldziher menerjemahkan kata *kuttab* dengan *maktab* dengan *elementary school* yang bertujuan untuk memberikan pendidikan tingkat pertama kepada anak didik (Ali, 1979: 78-79).

Pada abad ke-18, *kuttab* di Mesir pada umumnya berada di bawah pengawasan *Badan Waqaf*. Pendidikan juga dilaksanakan di masjid-masjid sejak 'Amr ibn Ash mendirikan masjid pertama di *Fusthath*. Missi masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Islam masih berjalan sampai sekarang. Sungguh pun demikian, tidaklah semua masjid berkembang menjadi institusi pendidikan yang

terorganisir, yang sempat berkembang ke arah ini, yaitu masjid Al-Azhar (Hasan, 1983: 33). Menurut Al-Maqrizi, di masjid ini terdapat delapan kelompok studi yang membahas berbagai cabang ilmu pengetahuan agama dan umum ('Ali, 1979: 128). Kemudian madrasah merupakan kelanjutan dari pendidikan yang awalnya dilaksanakan di masjid. Di Mesir, pertumbuhan madrasah erat hubungannya dengan pertarungan pemikiran untuk menghapus madzhab Syi'ah yang mulai berkembang sejak masjid Al-Azhar didirikan karena para ulama melihat tidak layak mengadakan perdebatan sengit mengenai sesuatu di dalam masjid (Hasan, 1983: 33) sehingga didirikanlah *Madrasah Al-Hafiziyah* dan *Madrasah Asy-Syafi'iyah*, keduanya merupakan madrasah pertama di Mesir ('Ali, 1979: 130-133).

Melihat kenyataan pendidikan di Mesir masih bersifat tradisional, maka pada tahun 1833, Muhammad Ali memerintahkan untuk membangun sepuluh buah sekolah dasar di Mesir, sebagai jenjang pertama untuk persiapan calon pelajar bagi sekolah-sekolah kejuruan sehingga pada masa Muhammad Ali, mulai berjalan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan modern yang sekuler, yang diselenggarakan secara terpisah. Akibatnya, lulusan sekolah ini pun terbagi dua; alumni sekolah agama dan alumni sekolah modern (Hasan, 1983: 41).

Sistem pendidikan, baru dapat dilihat pengaruhnya setelah usaha yang dilakukan oleh Khedive Ismail Pasya yang menjadikan Mesir bahagian dari Eropa. Beliau mengaktifkan kembali *Dewan Al-Madaris*, menambah jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah dan merencanakan *policy* pendidikan baru serta mengeluarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang dikenal dengan Undang-Undang 10 Rajab, Tahun 1284 Hijriyah, Nopember 1869 (Szyliowiez, 1973: 102).

Dengan berdirinya sekolah-sekolah dasar dan sekolah menengah, mulai dirasakan perlunya guru-guru yang berkualitas, maka oleh Ali Mubarak, dibuka sebuah pusat pelatihan untuk mendidik guru-guru yang diberi nama *Dar-Al-Ulum* (Dunne, 1968: 3). Lembaga ini ditempati untuk mendidik guru-guru dalam bidang fisika, geometri, ilmu bumi, sejarah dan tulisan indah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mendidik guru-guru untuk bidang studi yang diajarkan di Al-Azhar, seperti Al-Qur'an, tafsir, hadits, fiqh dan

bahasa Arab. Dengan demikian, *Dar Al-Ulum* berusaha menggabungkan bidang studi agama dengan bidang studi umum (modern). Suatu kebetulan pula bahwa pada masa perkembangan ini bertepatan dengan kedatangan Jamal al-Din al-Afgani ke Mesir dan permulaan usaha pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Melihat bahwa pendidikan pada masa itu terbagi menjadi tiga; pendidikan rakyat (yang diwakili oleh *kuttab*), pendidikan untuk keluarga penguasa, (diwakili oleh sekolah modern yang dibangun sejak masa Muhammad Ali) dan pendidikan ulama (diwakili oleh pendidikan akademis keagamaan seperti Al-Azhar). Pada masa itu, Muhammad Abduh merasakan bahwa pendidikan rakyat sangat diabaikan. Oleh karena itu, itu mengembangkan pendidikan rakyat, beliau mendirikan *al-Jami'ah al-Khairiyyah* pada tahun 1892 (Mursi, 1982: 304-305).

Periode Abduh ini merupakan periode yang menentukan dalam sejarah Mesir. Ide Barat mulai masuk disamping ulama tradisional. Terdapat kaum intelektual yang ingin terlepas sama sekali dari masa lampau. Mereka mengembangkan nasionalisme. Rasa nasionalisme mereka mendapat tempat yang penting sejak 1919, yang ditandai dengan meluasnya pendidikan di kalangan rakyat setelah tahun 1923 yang memberikan dukungan terhadap nasionalisme. Pada periode ini terdapat dualisme pendidikan. Satu pihak menginginkan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kelompok *elit* dalam masyarakat yang selanjutnya diharapkan dapat memimpin negara, sedangkan pandangan kedua menginginkan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa.

Pada tahun 1935, pemerintah membuat gagasan untuk melaksanakan secepat mungkin rencana perluasan pendidikan yang telah disepakati. Kemudian pada tahun itu pula, diputuskan untuk mengubah sistem belajar di *kuttab* menjadi sistem sekolah sehari penuh (*full day system*) di seluruh kota-kota propinsi (Hasan, 1983: 49). Untuk usaha ini, pada tahun 1937, pemerintah telah menyerahkan kepada seluruh kantor di propinsi untuk mengatur *kuttab-kuttab* yang ada di daerah masing-masing. Kemudian pada tahun 1983, pemerintah menghilangkan jurang antara *kuttab* dan sekolah dengan memindahkan pelajaran bahasa asing dari tingkat satu ke tingkat dua (Hasan, 1983: 50). Pada tahun 1944 Departemen Pendidikan

memutuskan untuk menghapuskan biaya sekolah pada sekolah-sekolah dasar. Hal ini dimaksudkan untuk mengikis perbedaan tingkat sosial dan memasyarakatkan pendidikan. Pada tahun 1949, anak didik dibebaskan dari biaya pembelian buku (Hasan, 1983: 50).

MESIR MENUJU SISTEM PENDIDIKAN MODERN

Meletusnya revolusi pada tahun 1952 di Mesir, telah memberi warna baru sepanjang sejarah Mesir, di mana sebuah rejim baru membawanya menuju tujuan modernisasi yang menguasai dan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Masyarakat modern Mesirlah yang menjadi visi presiden *Gamal Abdul Naser*, seorang pemimpin yang penuh kharismatik di Timur tengah, yang berperan memainkan aturan-aturan penting baik dalam transformasi masyarakat Mesir maupun dalam arena internasional (Szyliowiez, 1973: 253).

Yang pertama kali dilakukan Naser adalah memperkuat posisi kekuasaannya dengan menghapus monarki menuju sebuah organisasi politik, juga mengasingkan semua asosiasi, baik yang bergerak di bidang agama, maupun yang bergerak di bidang sosial sehingga kekuasaannya menjadi lebih tersentralisasi. Untuk memobilisasi dukungan, untuk melegitimasi otoritas dan tujuan perkembangan nasional, Naser hanya membentuk satu partai liberal kemudian direorganisasi menjadi *Uni Nasional* atau *Uni Sosialis Arab*. Perubahan partai-partai tersebut menunjukkan evolusi orientasi pemerintahan dan usaha untuk menginstitusi serta melegitimasi peraturannya menjadi modernisasi.

Untuk mewujudkan tujuan modernisasinya, Naser membaginya tiga tahap. **Pertama** (1952-1956), mengadakan konsolidasi kekuatan secara revolusioner, juga membentuk partai liberal untuk mendukungnya. Selain itu ia juga menempuh jalan memanfaatkan kaum agamawan untuk mendapatkan legitimasi untuk kelanggengan posisinya; **kedua** (1956-1961), melakukan upaya-upaya pembangunan dengan menekankan pada aspek ekonomi dan reorganisasi sosial. Untuk tujuan itu, konstitusi baru segera dilaksanakan pada tahun 1956 dengan memberikan penekanan pada dedikasi pemerintah untuk mencapai keadilan sosial. Pada periode ini,

isu kebijakan luar negeri melanda Mesir, diikuti krisis Suez pada tahun 1956. Pada era inilah Naser tampil sebagai aktor yang memimpin Nasionalis Arab, yang kemudian menerapkan ideologi sebagai faktor legitimasi; *ketiga (1961)*, menerapkan ideologi baru dalam rangka transformasi sosial yang menekankan pada bidang ekonomi dan industrialisasi (Szyliowiez, 1973: 253).

Kebijakan-kebijakan politik tersebut di atas, membawa implikasi pada penyelenggaraan pendidikan Islam, karena pemerintah berusaha membangun kembali sistem pendidikan untuk menyesuaikan dengan konstalasi politik dan sosial yang berkembang dan tujuan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai pada saat itu. Beragam reformasi telah dilakukan, termasuk penekanan pada sekolah kejuruan, teknik dan pelatihan ilmiah, juga upaya-upaya penyempurnaan pendidikan secara luas (Mahrouse, 1994: 1942).

Adapun kebijakan-kebijakan pada sektor pendidikan pada masa awal, diterbitkan berbagai undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 210 Tahun 1953 yang bertujuan menasionalisasikan semua pendidikan persiapan (*prepatory education*) terjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama ditempuh oleh anak didik dalam usia 6 sampai 12 tahun. Lulusan tingkat dasar ini dapat meneruskan pelajaran ke tingkat SLTA, 3 tahun. Selanjutnya, Undang-Undang No. 213 Tahun 1956 dikeluarkan untuk penghapusan biaya sekolah pada setiap pendidikan negeri (Hasan, 1983: 51). Undang-undang ini juga melarang ujian promosi tingkat atau kelas tanpa batas-batas tahun yang telah ditentukan. Pada tahun 1958, dikeluarkan Undang-Undang No. 160 yang melarang semua sekolah asing, dan menyerahkannya kepada pihak swasta dalam negeri, kurikulum sekolah-sekolah pada masa ini kemudian berada dalam pengawasan Departemen Pendidikan. Dengan demikian, kurikulum semua institusi pendidikan di Mesir, berada di bawah pengarahan pemerintah. Pada tahun 1956, ketika ada krisis Terusan Suez, pemerintah membentuk pelatihan militer yang dipersiapkan untuk pertahanan (Dodge, 1961: 157).

Terjadinya revolusi pada tahun 1952, pemerintah mengambil sikap hampir sama dengan sikap yang diambil oleh Muhammad Ali, mengenai peranan agama dalam kehidupan beragama dalam negara, di mana rezim Jamal Abdul Naser telah memainkan peranan ambivalen dalam agama. Negara senantiasa membuat kompromi-kompromi

dengan agama. Islam dinyatakan sebagai agama negara, tetapi hukum Islam ditafsirkan dalam jubah sekuler. Singkatnya rezim ini hendak merumuskan agama dalam arah yang sesuai dengan tujuan-tujuan politiknya (Abaza, 1994: 34-48).

Badan Wakaf akhirnya mengalami serangkaian perubahan dan berhasil dimasukkan ke dalam kontrol penuh pemerintah pada tahun 1952, termasuk Al-Azhar. Walaupun Universitas Al-Azhar ini tidak banyak berpengaruh dalam kehidupan politik pemerintahan Mesir dibanding dengan universitas-universitas lainnya, seperti Universitas Kairo, Universitas Alexandria, Universitas Ainun Syams dan Assyut, namun Al-Azhar merupakan lembaga yang dihormati oleh kalangan masyarakat Mesir sehingga para penguasa sering mengadakan intervensi untuk merebut simpati rakyat dalam rangka memperoleh legitimasi rakyat atas kekuasaannya (Abaza, 1994: 34-48). Al-Azhar merupakan lembaga yang sangat strategis untuk dimanfaatkan melakukan ide-ide pembaharuan karena Al-Azhar merupakan pusat studi Islam yang terkenal (Bisri, 1985). Al-Azhar merupakan pusat pendidikan agama yang menonjol di dunia Islam. Selain itu, Al-Azhar juga merupakan salah satu dari lembaga-lembaga paling penting yang menerima dan mendidik mahasiswa asing dari belahan dunia, di antaranya mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Cina dan lain-lain (Abaza, 1994: 38-39).

Modernisasi Al-Azhar sebenarnya telah dimulai oleh sekelompok ulama tertentu pada abad ke-19, yang terkemuka di antaranya adalah Muhammad Abduh, tetapi efeknya hanya dirasakan pada lapangan organisasi, sistem ujian dan pengenalan kajian-kajian tertentu (Rahman, 1995: 118). Kemudian perubahan juga terjadi pada tahun 1960-an, saat pemerintah melihat bahwa negara mengharapkan generasi mudanya tidak hanya sekedar belajar keagamaan, tetapi juga ilmu-ilmu *profan* sehingga mereka dapat berguna bagi tanah airnya. Di samping itu, mahasiswa yang dididik dengan pendidikan sekuler pada Universitas Mesir, kurang mendapatkan porsi pelatihan keagamaan, sehingga dipadukanlah ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu *profan* (Crecelius, 1966: 37).

Untuk melanjutkan modernisasi pendidikan di Universitas Al-Azhar, tepatnya pada tanggal 18 Juli 1961, Presiden Jamal Abdul Naser menetapkan bahwa administrasi Universitas Al-Azhar

diletakkan di bawah kekuasaannya, yang kemudian membawa perubahan terhadap sistem, perencanaan dan program-program studi di Al-Azhar. Dalam hal ini, Jamal Abdul Naser mengikuti program-program Thaha Husein (Mardjoko, 1994: 80), yaitu dengan: *pertama*, menambah fakultas-fakultas sekuler pada Universitas Al-Azhar, seperti (1) Fakultas Pendidikan, (2) Fakultas Kedokteran, (3) Fakultas Perdagangan dan Manajemen, (4) Fakultas Sains dan Industri, (5) Fakultas Pertanian, (6) Fakultas Farmasi dan (7) Fakultas Ilmu Alam (Al-Bahiy, 1982: 411; Jameela, t.t.: 201); *kedua*, menambah muatan kurikulum, yaitu agar sekolah-sekolah modern dibuka, di mana ilmu-ilmu pengetahuan modern diajarkan, disamping ilmu pengetahuan agama. Kurikulum Universitas Al-Azhar dilengkapi dengan ilmu pengetahuan modern agar para ulama mengerti kebudayaan modern sehingga dengan demikian mereka dapat menemukan solusi bagi persoalan-persoalan yang timbul di zaman modern (Mardjoko, 1994: 80; Nasution, 1982: 31). Tentang muatan kurikulum, lebih khusus ditujukan pada pengajaran bahasa-bahasa asing (Barat) yang secara khusus Thaha Husein mengusulkan agar empat bahasa: Inggris, Prancis dan Italia, diajarkan pada sekolah-sekolah di Mesir (Husein, 1973: 252). Alasannya adalah: (1) bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seseorang dituntut untuk bisa menguasai beberapa bahasa asing yang dapat menunjang perkembangan ilmu, (2) bahwa ilmu pengetahuan serta keunggulan iptek dan seni tidak selayaknya dimiliki oleh satu bangsa saja melainkan harus dimiliki oleh semua bangsa; *ketiga*, memperbanyak pengiriman duta-duta ilmu pengetahuan ke negara-negara Barat. Studi ke negara-negara Barat menurut Thaha Husein, merupakan suatu langkah yang absah, mengingat orang-orang Barat dulu belajar ke Timur Tengah, terutama pada abad pertengahan, di saat kaum muslimin memiliki peradaban yang kosmopolit. Segalanya telah berubah di saat orang-orang Barat menuju tatanan dunia modern umat justru Islam lambat laun mengalami stagnasi pemikiran. Kini dunia Barat telah sampai kepada kemajuan di berbagai bidang, maka semestinya orang-orang muslim belajar dari kemajuan yang telah diperoleh Barat; dan *empat*, memperbanyak fasilitas pendidikan. Fasilitas yang perlu diperbanyak adalah ruang belajar. Thaha Husein mendorong pemerintah untuk segera membangun ruang belajar sehingga tercipta kondisi ideal

antara jumlah kelas, sekolah dengan jumlah siswa. Usaha ini berhasil, di mana pemerintah membangun ruang belajar sebanyak 2600 buah, serta menghapuskan uang sekolah untuk tingkat menengah (Mardjoko, 1994: 90).

Perubahan yang besar itu pada dasarnya didesak oleh kenyataan bahwa jumlah mahasiswa Al-Azhar yang bertambah besar dengan cepat tidak bisa bersaing dengan produk-produk sistem pendidikan umum, jadi fakultas-fakultas baru tersebut terutama ditujukan untuk menyesuaikan. Tetapi manfaat yang nyata yang lain terlihat dari kenyataan bahwa suatu kelas profesional yang berbobot akan diciptakan, yang memiliki pengetahuan yang mantap tentang Islam dibanding dengan produk-produk sistem pendidikan umum, yang hanya memiliki pengetahuan agama yang dangkal. Tak syak lagi ini merupakan perkembangan yang sangat penting dan, dari sudut pandangan agama akan mempunyai efek-efek berjangkauan jauh dalam jaringan kehidupan sosial Mesir (Rahman, 1995: 121). Diperkenalkan guru-guru wanita di sekolah-sekolah dan runtuhnya dinding pemisah total antara laki-laki dan wanita dalam pergaulan sosial.

Dalam tahun 1962, sebuah akademi wanita juga didirikan dalam kompleks Al-Azhar, yang kemudian menjadi sebuah universitas (di lingkungan Al-Azhar) yang memiliki fakultas kedokteran sendiri (Rahman, 1995: 121). Dengan demikian, secara sosiologis, hal ini tentu saja merupakan perubahan-perubahan yang mengejutkan.

Menurut Harun Nasution (1982: 48), gagasan memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita pada Islam modern di Mesir ini, pertama kali digaungkan oleh Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1873) agar wanita Mesir memperoleh pendidikan yang sama dengan pria. Tujuan pendidikannya agar wanita dapat menjadi isteri yang baik dan dapat menjadi teman suami dalam kehidupan intelek dan sosial, lebih dari itu pendidikan wanita ini juga dalam rangka membentuk kepribadian dan menanamkan rasa patriotisme atau *Hubbu al-Watan*. Gagasan tersebut semakin dipertegas oleh Muhammad Abduh (1849-1905). Menurut Abduh wanita dalam Islam sebenarnya mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi adat istiadat yang berasal dari luar Islam mengubah hal tersebut sehingga akhirnya wanita Islam mempunyai kedudukan rendah dalam masyarakat (Nasution, 1982: 79). Ide ini

kemudian dikupas panjang lebar oleh Qosim al-Amin (1865-1908) dalam bukunya *Tahrir al-Mar'ah* (kebebasan wanita) terbit tahun 1900 dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (wanita modern) terbit tahun 1901. Menurut Qosim Amin, umat Islam mundur karena kaum wanita (setengah dari jumlah penduduk Mesir) tidak pernah memperoleh pendidikan sekolah. Pendidikan wanita itu perlu. Hal tersebut bukan hanya agar wanita dapat mengatur rumah tangga, melainkan juga agar mereka dapat memberikan pendidikan dasar bagi putra-putri mereka. Ide ini kemudian diteruskan oleh Thoha Husein (1899-1973) dan pada masanya (1954) wanita telah diizinkan kuliah di Al-Azhar. Dengan demikian, gagasan memperjuangkan pendidikan wanita pada masa Islam modern menunjukkan adanya kesinambungan organik yang tidak terputus dari para pemikir sebelumnya sampai didirikannya akademi wanita di kompleks Al-Azhar.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan modern masuk ke wilayah Timur Tengah melalui pintu belakang, berupa pengaruh-pengaruh budaya politik Barat.

Orientasi pembaruan pendidikan Islam yang berpola pada pendidikan Barat pada dasarnya karena ada asumsi bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai.

Pembaharuan pendidikan di Mesir dapat berlangsung karena mendapat dukungan kondisi politik pemerintah yang sedang mengalami perubahan terutama adanya revolusi pada tahun 1952.

Modernisasi sistem pendidikan Mesir telah dimulai sejak abad ke 19 di antara tokohnya adalah Muhammad Abduh namun hasilnya belum banyak dirasakan. Kemudian perubahan-perubahan secara nyata dapat diakui, yaitu sejak tahun 1952 dan tahun 1962 di mana Gamal Abdul Naser mencoba memodernisasikan Al-Azhar dengan dibukanya fakultas-fakultas baru seperti fakultas kedokteran, serta fakultas untuk wanita. Sedangkan pengembangan pendidikan di Mesir pada tahun-tahun berikutnya belumlah dikaji dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Said Ismail. 1979. *Ma'ahid al-Ta'lim al-Islam*. Cairo: Dar al-Tsaqofah.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- AL-Bahiy, Muhammad. 1982. *al-Fikr al-Islamiy wa al-Mujtama' al-Mu'ashir*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Belgrami, Hamid Hasan, dan Ali Said Asyraf. 1989. *The Concept of University*, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bisri, Mustofa. "Al-Azhar, Kiblat Studi Islam" dalam majalah *Pesantren, P3M*, No. I/Vol. II/1985.
- Crecilius, Daniel. 1966. "Al-Azhar in Revolution" dalam *Journal the Middle East Institute*. Washington DC: William Sand.
- Dodge, Bayard. 1961. *AL-Azhar, a Millenium of Islam Learning*. Washington DC. : The Middle East Institute.
- Dunne, J. Heyworth. 1968. *An Introduction to the History of Education in Modern Egypt*. London: Frank Class & Co. Ltd.
- Hassan, Affan, et.al., 1983. *Pendidikan Islam di Indonesia dan Mesir: Titik Berat pada SMP-SMA*. Cairo: KBRI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Husein, Thoha, 1973. *Ilmu Tarbiyah Yahtawiy 'ala Mustaqbal al-Tsaqafah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Labnaniy.
- Jameelah, Maryam. t.th. *Islam and Modernism*, terj. A. Jainuri dan Syafiq A. Mugni. Surabaya: Usaha Nasional.

- Mahrouse. 1994. "Egypt, System of Education", pada *The International Encyclopedia of Education*, Vol. 4 Tosten Husen (ed.). Oxford: El Sevier Science Ltd.
- Marjoko. 1994. *Thoha Husein: Pendidikan Islam dan Kebangkitan Intelektual Mesir*, tesis, Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga.
- Mafrodi, Ali. 1997. *Islam Kawasan Kebudayaan Arab*. Cet. I. Jakarta: Logos.
- Mursi, Muhammad Rusnir. 1982. *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*. Cairo: 'Alam al-Kutub.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahman, Fazlur. 1995. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual*, terj. Ahsin Muhammad. Cet. II. Bandung: Pustaka.
- Radnison. 1994. "Generasi baru Gerakan Mahasiswa Indonesia di al-Azhar" dalam *Islamika: Jurnal Pemikiran Islam*. Bandung: Mizan.
- Szyhowiez, Joseph S. 1973. *Education and Modernization in the Middle East*, New York: Cornell University Press.
- Von Gronebaum, Gustav E. 1965. "Acculturation and Self-Realization" dalam B. Rivlin dan J. Azyliawiez (ed.), *The Contemporary Middle East*. New York: Random House.